

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai penyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) nomor empat di Indonesia, pariwisata diharapkan berkontribusi lebih dan menjadi *core business*. Studi terbaru telah memperhatikan adanya masyarakat sebagai pemain penting mengingat sumber daya daerah dan pengelolaan lingkungan serta kegiatan masyarakat bertujuan dalam mengoptimalkan secara sosial dalam kerangka 'tata kelola interaktif.' (Governance & Watershed, 2021). Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 di dalam bagian a pertimbangan pembentukannya yang menyatakan bahwa “keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Aktifitas manusia di hiruk pikuk kota perlu adanya keseimbangan dengan wisata yang alami, tenang bahkan jauh dari hal yang memberikan pengaruh buruk terhadap kebugaran secara fisik/psikis agar kembali *fresh* serta mendapat energi positif yang baik untuk kembali bekerja. (Wahyudi, 2020). Menurut Suwanto (1997: 2017), wisata alam adalah suatu kegiatan yang dilakukan di alam dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan tata lingkungan. Wisata alam memiliki sumber daya yang berasal langsung dari alam. Selain itu, terdapat struktural fungsional yang mana memandang masyarakat sebagai satu kesatuan yang membentuk struktur serta menimbulkan keserasian didalamnya. Dalam hal ini satu kesatuan masyarakat desa yang bekerja sama menyatukan visi untuk memajukan potensi wisata alam yang ada di daerahnya (Safira, 2021). Di Indonesia sendiri yang sudah dikenal dengan alam yang indah tentunya tidak jauh dari bahasan ini. Wisata alam di Indonesia dengan mudah dijumpai bahkan memiliki banyak opsi di setiap daerah. Hal ini juga dibuktikan dari data kemenparekraf

bahwa saat ini ekonomi kreatif Indonesia juga masuk peringkat ketiga dunia setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan. (Indonesia.go.id)

Pariwisata sering dijadikan sebagai alat vital bagi pembangunan pedesaan, berkontribusi pada perubahan dari sektor primer menjadi ekonomi berbasis layanan. (Mattson, 2019). Dampak dari pengembangan pariwisata harus tersebar meliputi ruang dan waktu, serta mempertimbangkan dampak negatif pembangunan terhadap masyarakat sebagai tuan rumah dan lingkungan setempat. (Booyens, 2022). Pengembangan pariwisata juga tidak hanya dipandang sebagai mesin ekonomi pertumbuhan, tetapi juga telah dipandang sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan dan memajukan ketahanan pangan, terutama di negara berkembang. (Odhiambo, 2021). Dampak dari pengembangan pariwisata ini nantinya akan sangat dirasakan dalam sektor ekonomi yang kita ketahui bahwa hal ini sudah bergantung secara substansial pada industri pariwisata. Pengembangan pariwisata selama ini dianggap tidak hanya sebagai katalis untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai cara efektif untuk mengentaskan kemiskinan (Medina-Munoz et al., 2016). Meskipun peran pariwisata memiliki sisi menguntungkan dalam mengurangi kemiskinan, pengembangan pariwisata memiliki kelemahan tersendiri bagi negara penerima. Pariwisata dapat menyebabkan degradasi budaya dan gangguan masyarakat di negara tujuan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penolakan terhadap orang asing wisatawan oleh penduduk lokal (UNEP, 2011; UNCTAD 2013)

Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat atau *community-based natural resources management* (CBNRM) adalah pendekatan populer untuk mempromosikan pengelolaan sumber daya alam secara kolektif dan berkelanjutan (Blaikie, 2006). Pariwisata memperhatikan kelestarian lingkungan, sosial dan budaya. Dikelola dan dimiliki oleh masyarakat, untuk masyarakat, dengan tujuan memungkinkan pengunjung untuk meningkatkan kesadaran mereka dan belajar tentang komunitas dan cara hidup lokal (www.cbt-i.org). Rainforest Alliance dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 40% proyek CBT di negara berkembang tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sedangkan 60% melibatkan beberapa bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan

(ibid). Karena meningkatnya aksi gerakan sosial dan kampanye tatanan ekonomi yang adil pada tahun 1970-an, upaya konservasi mulai melibatkan partisipasi masyarakat, menyoroti pentingnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, terjadi peningkatan kesadaran bahwa karena masyarakat setempat memiliki pengetahuan yang lebih mengenai wilayah sekitar serta mengelola sumber daya mereka dalam hal penggunaan. Mereka juga dinilai lebih mampu melestarikan sumber daya dengan beberapa dukungan eksternal melalui pendekatan berbasis masyarakat seperti konservasi terpadu dan program pengembangan (Bidii & Ngugi, 2014).

Analitik teori didukung oleh dua teori : *structural functionalism* dan *interest game theory*. *Structural functionalism* membantu anggota komunitas memahami bagaimana cara yang dapat membantu memenuhi kebutuhan sosial. Hal ini juga membantu menjelaskan kepada komunitas dan individu tentang sejumlah kegiatan yang diperlukan untuk memastikan bahwa kebutuhan tertentu terpenuhi sehingga dapat mempertahankan kehidupan sosial dan membantu masyarakat/komunitas untuk berkembang. Sedangkan *interest game theory* juga disebut *interactive decision theory* atau teori keputusan interaktif dengan kata lain mempelajari model matematika dari konflik dan kerja sama antara pembuat keputusan yang cerdas dan rasional. Kata “*game*” di sini merujuk pada sumber daya alam. Unsur-unsur dari teori ini adalah para pemain, informasi dan tindakan yang akan dilakukan oleh setiap pemain di setiap keputusan dan hadiah untuk setiap hasil. Ahli teori permainan secara khas menggunakan elemen-elemen ini dan konsep solusi yang mereka pilih untuk menyimpulkan serangkaian strategi keseimbangan untuk setiap pemain. Jadi, ketika strategi ini digunakan, tidak ada pemain yang dapat memperoleh keuntungan dengan menyimpang secara sepihak dari strategi tersebut. (Eneji & Ering, 2018)

United Nations Conference on Environmental and Development (UNCED) atau yang juga dikenal sebagai Laporan Brundtland diterbitkan di Stockholm pada tahun 1972 (Ochola, Sanginga, & Bekalo, 2010). Konferensi ini memperkenalkan gagasan pembangunan ramah lingkungan yang mengarah pada pembentukan *United Nations Environmental Programme* (UNEP) dimana definisi pembangunan berkelanjutan didirikan. UNCED berikutnya diselenggarakan di Nairobi, Kenya pada tahun 1987 yang melahirkan gagasan pembangunan berkelanjutan (Ochola, Sanginga, & Bekalo, 2010). Setelah Perang Dunia Kedua, donor internasional memusatkan upaya mereka pada

sentralisasi pendekatan terhadap konservasi dan pembangunan sumber daya alam di negara berkembang (Dressler, et al., 2010). Dengan pesatnya penyebaran modernisasi dan peningkatan bantuan donor pada tahun 1960-an, negara-negara berkembang menggunakan banyak bantuan untuk kepentingan elit di masyarakat, pariwisata dan konservasi; Namun, ini tidak berhasil sejak praktik perlindungan sumber daya dan pembatasan berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat lokal secara sosial dan ekonomis (Dressler, et al., 2010).

Di Kenya CBNRM semakin populer karena diakui kebutuhannya melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya. Pendekatan proteksionis dalam mengelola sumber daya alam juga gagal berfungsi di Kenya karena meningkatnya angka kemiskinan di kalangan masyarakat yang hampir terlindungi sumber daya alam serta degradasi yang berkelanjutan (Awimbo, Barrow, & Karaba, 2014). Diperkirakan hutan di Kenya telah berkurang dengan kecepatan sekitar 5.000 hektar per tahun yang merupakan penyebab utama kekhawatiran. Sejak saat itu, Sektor Kehutanan mempekerjakan lebih dari 5000 orang secara langsung dan 300.000 lainnya secara tidak langsung dan memberikan kontribusi 62 juta Dolar bagi perekonomian setiap tahunnya (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018). Dengan populasi tingkat pertumbuhan Kenya berdiri di 3,2% permintaan sumber daya lokal juga meningkat terutama karena hanya 20% tanah subur dan ada kebutuhan yang lebih tinggi di kalangan masyarakat pedesaan untuk meningkatkan ruang untuk budidaya (Maundu & Tegnas, 2005). Untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat lokal dalam konservasi hutan, Bagian 46 Undang-undang Hutan mengizinkan masyarakat hutan untuk mendaftar *community forest associations* (CFAs) di bawah *Societies Act* 1998 (Matiku, Mireri, & Callistus, 2013). Penggunaan yang tidak berkelanjutan dari Aberdare Forest memerlukan pemahaman tentang bagaimana CBNRM digunakan sebagai pendekatan yang berhasil mengubah narasi pemanfaatan hutan di Kenya.

Pulau Lusi merupakan pulau buatan yang diambil dari endapan lumpur lapindo. Pulau ini mulai dibentuk sejak tahun 2008 tepatnya dua tahun pasca terjadinya bencana lumpur lapindo. Daerah Pulau Lusi termasuk dalam wilayah Wisata Bahari Tlocor yang berlokasi di desa Kedung Pandan. Sebelum diresmikan oleh menteri kelautan pada Tahun 2019, Wisata Bahari Tlocor dikelola oleh warga setempat. Meskipun pulau buatan, hal yang menarik pada Pulau tersebut adalah adanya konservasi mangrove serta pelestarian hewani berupa tambak ikan di sekeliling pulau. Konservasi mangrove merupakan

ekosistem yang berada di atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Ekosistem mangrove memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi alam sekitarnya. (Zaitunah, 2002). Dikutip dalam penelitian sebelumnya, dijelaskan bahwa pengembangan di Pulau Lusi masih belum ditunjukkan maksimalnya karena sudah dikelola langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang resmi pada tahun 2019. Memiliki sumber daya alam yang berpotensi untuk menjadi pengembangan wisata alam, Pulau Lusi menjadi perhatian masyarakat serta *stakeholder* terkait. Masyarakat lokal mulai menyadari eksistensi Pulau Lusi yang menjadi wisata baru membuat mereka menyadari dampak yang dapat dirasakan dari segi ekonomi. Masyarakat lokal terlibat dalam bentukan UMKM serta menjadi penggerak dalam pengelolaan selama wisata berlangsung. Selain itu, wilayah yang digunakan masih kepemilikan bagi masyarakat lokal dan sudah sepatutnya mereka ikut andil. Obyek wisata yang dikembangkan dengan memperoleh dukungan dari masyarakat merupakan jaminan keberlanjutan pembangunan wisata sekaligus dapat meningkatkan mutu pengalaman wisatawan (Damanik 2013; Nasikun 2000; Wood 2002).

Pengembangan wisata dalam perspektif pemasaran melibatkan beberapa strategi dan konsep pemasaran yang berbeda, seperti menemukan keinginan wisatawan, menetapkan sasaran pemasaran, dan mengembangkan strategi pemasaran yang bertanggungjawab. (Waskita & Purwanto, 2018). Trilogi Pembangunan yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan pemerataan pendapatan antar berbagai kelompok dalam masyarakat merupakan penopang utama bagi pengembangan sektor pariwisata. (Prayogo, 2018). Dalam konsep CBT, masyarakat lokal terlibat dalam promosi pariwisata melalui media sosial dan pemasaran langsung. Hal ini dapat meningkatkan promosi destinasi wisata dan menarik minat wisatawan. (Novaria & Rohimah, 2018) Media sosial dapat mempengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung ke suatu destinasi wisata serta dapat membantu meningkatkan citra destinasi wisata dengan membagikan informasi dan gambar yang menarik tentang destinasi tersebut. (Lustono & Permatasari, 2022) Media sosial memungkinkan destinasi wisata untuk berinteraksi dengan wisatawan secara langsung, memberikan informasi, dan menjawab pertanyaan wisatawan serta memungkinkan destinasi wisata untuk mempromosikan diri mereka sendiri dengan biaya yang lebih rendah dan lebih efektif. Dengan adanya media sosial, pesan promosi dapat disebarluaskan dengan cepat dan mudah. (Nifita & Arisonaha, 2021)

Penelitian-penelitian sebelumnya hanya mengkaji mengenai pengembangan Pulau Lusi agar lebih dikenal oleh khalayak luas serta mengenai geografis pulau tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai **“Analisis Peran Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Wisata Alam Berdasarkan Konsep *Community-Based Natural Resources Management* di Pulau Lusi”**

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana potensi sumber daya alam dapat dikembangkan menjadi wisata alam di Pulau Lusi?
2. Bagaimana peran masyarakat lokal dalam pengembangan wisata alam berdasarkan sumber daya alam di Pulau Lusi?

1.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui potensi sumber daya alam dapat dikembangkan menjadi wisata alam
2. Untuk mengetahui peran masyarakat lokal dalam mengembangkan wisata alam berdasarkan sumber daya alam di Pulau Lusi.

1.3 Manfaat

Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai pentingnya peranan masyarakat serta pengembangan wisata alam di Indonesia, serta diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan di bangku kuliah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan peneliti tentang *community based tourism*, pariwisata Indonesia, dan pengembangannya.

- b. Bagi pengelola Pulau Lusi

Peneliti berharap dalam penelitian ini dapat menjadi gagasan

baru dan evaluasi terhadap keterlibatan masyarakat lokal terhadap pengembangan ekowisata di Pulau Lusi agar menarik wisatawan.

Dalam studi kualitatif ini, peneliti menggunakan metode studi kasus dengan wawancara dan observasi. Karena tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui lebih dalam upaya dan pengembangan wisata alam di Pulau Lusi dengan partisipasi masyarakat lokal. Alasan peneliti menggunakan metode studi kasus adalah sesuai kebutuhan mengenai data yang didapat dari suatu kasus. Selanjutnya pada bab ini, peneliti akan menyajikan gambaran rinci tentang lokasi penelitian serta strategi pengumpulan data.

Dalam upaya memudahkan pemahaman isi dari laporan penelitian ini, penulis membagi laporan menjadi tiga bab. Ketiga bab tersebut meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, serta tujuan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan tema yang dikaji sebagai pendukung dari penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat desain penelitian, lokasi dan partisipan penelitian, teknik pengumpulan data, etis penelitian, analisis data, dan validitas data.